



**PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM OLEH
KESBANGPOL DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2016**

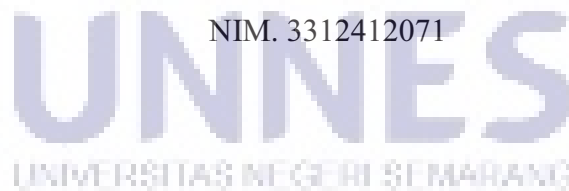
SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1 Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial

Oleh

Octendy Rhizal Saputra

NIM. 3312412071



**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

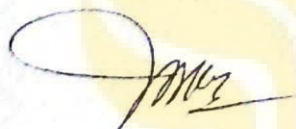
Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang
panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

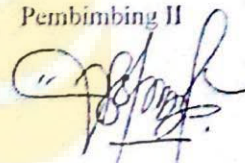
Menyetujui,

Pembimbing I



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 197610112006041002


Pembimbing II



Puji Lestari S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

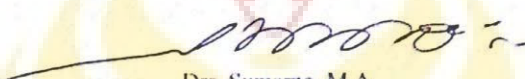
Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Islam Oleh Kesbangpol Di Kota Semarang Tahun 2015-2016 ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :
Tanggal :


Penguji Utama



Drs. Sumarno, M.A

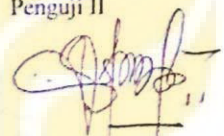
NIP. 195610101985031003

Penguji I



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002


Penguji II



Puji Lestari S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh Solchatul Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2017



Octendy Rhizal Saputra
NIM: 3312412071



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Setiap individu punya kekuatan/daya masing-masing namun ada kalanya harus di kendalikan supaya kekuatannya bisa di pertanggungjawabkan, karena kekuatan yang besar akan mendatangkan tanggungjawab yang besar pula”

- Octendy Rhizal Saputra -

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Allah SWT
2. Haryanto dan Sri Wahyuni selaku orang tua kandung yang memberikan do'a dan segalanya.
3. Novianto Yusuf Pradana sebagai kakak kandung.
4. Keluarga besar KURAWA SQUADRA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari.
5. Dosen Prodi Ilmu Politik Unnes.
6. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini.
7. Kekasih saya yang selalu memberi semangat
8. Almamaterku.

SARI

Rhizal Saputra, Octendy. 2017. *Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Islam Oleh Kesbangpol Di Kota Semarang Tahun 2015-2016*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I. Andi Suhardiyanto, S. Pd., M. Si, Dosen Pembimbing II. Puji Lestari, S. Pd., M.Si.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ormas, Dampak Pemberdayaan.

Konteks pemberdayaan sebenarnya mengandung unsur partisipasi. dalam hal ini ormas islam di libatkan dalam berpartisipasi yaitu dilibatkan dalam proses pembangunan, gotong royong menangkal ormas yang radikal, membantu proses demokrasi (pemilu) dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya Kesbangpol Kota Semarang dalam proses memberdayakan ormas islam. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses pemberdayaan organisasi masyarakat islam tersebut.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kesbangpol Kota Semarang. Fokus penelitian ini adalah: (1) Upaya pemberdayaan ormas yang meliputi: fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan (2) Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan meliputi: faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang di berikan oleh Kesbangpol Kota Semarang berbentuk: (1) Fasilitasi Kebijakan yang berupa mengimplementasikan undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan ormas, (2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan yang terdiri dari: a. Penguatan Manajemen Organisasi melalui dana bansos yang di berikan oleh pemerintah; b. Penyediaan Data dan Informasi yang berupa informasi tentang kegiatan pemerintah, c. Pengembangan Kemitraan yang berupa kerjasama dengan ormas-ormas dengan pemerintah, d. Dukungan Keahlian, Program, dan Pendampingan yang berupa memberikan traning kepada ormas yang bisa berkerjasama dengan pemerintah, d. Penguatan Kepemimpinan dan Kaderisasi yang berupa memberikan pelatihan tentang bagaimana kaderisasi untuk menjadi pemimpin, e. Pemberian Penghargaan yang berupa memberikan apresiasi terhadap ormas yang bisa menjalankan programnya yang sesuai dengan program

pemerintah; dan f. Penelitian dan Pengembangan yang berupa memberikan ijin dan ruang untuk melakukan penelitian yang bersifat mendukung pemerintahan. (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdiri dari: a. Pendidikan dan Pelatihan yang berupa pelatihan kaderisasi terhadap ormas yang perlu di berdayakan, b. Pemagangan yang berupa memberikan kesempatan kepada anggota ormas yang ingin mengimplementasikan keahliannya, dan c. Kursus yang berupa memberikan gambaran tentang cara membangun ormas yang baik. Lalu sosialisasi tentang program pemberdayaan yang harus di tekankan oleh Kesbangpol supaya terciptanya situasi kondusif antara pemerintah daerah dengan ormas-ormas islam yang ada di kota Semarang.

Ormas Islam sendiri memiliki kelemahan sehingga harus di adakannya program pemberdayaan ormas. Kelemahan mereka pun berbagai macam seperti memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif. Berbagai ormas baru tersebut memang memiliki platform yang beragam, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan visi, yakni pembentukan “Negara islam” (*daulah islamiyah*) dan mewujudkan penerapan syariat islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.

Bahwa untuk lebih meningkatkan peran ormas untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan ditingkat daerah perlu adanya hubungan yang cukup signifikan antara ormas dengan pemerintah dalam membangun struktur sosial, budaya dan hubungan antar masyarakat dalam suatu wilayah. Keterkaitan itu Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran ormas dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang demokratis sudah semakin terbuka lebar, dengan adanya kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat, kebebasan membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembentukan masyarakat sipil yang mempunyai peran yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M. Si, selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Andi Suhardiyanto, S. Pd., M. Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini serta sabar dalam membimbing skripsi
5. Puji Lestari, S. Pd., M.Pd pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi dan tulus ikhlas sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Dosen jurusan Politik dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Unnes yang telah memberi bekal ilmu dan sumber inspirasi serta dukungan moril dalam membantu menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.
7. Bapak Kepala Sub. Bidang Ketahanan Bangsa Kesbangpol Kota Semarang yaitu bapak Hartono yang telah memberi kesempatan penelitian kepada penulis.

8. Haryanto dan Sri Wahyuni orang tua kandung yang memberikan do'a dan segalanya.
9. Novianto Yusuf Pradana sebagai kakak kandung.
10. Teman – teman KURAWA SQUADRA yang sudi menemani, menasehati, yang selalu saling mengingatkan, teman diskusi, teman seperjuangan susah dan senang yang mau diajak kesana-kemari.
11. Keluarga besar Prodi Ilmu Politik Unnes Angkatan 2012
12. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Almamaterku

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian do'a semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, Juni 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Octendy Rhizal Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teoritis	
1. Organisasi Masyarakat Islam	13
2. Definisi Pemberdayaan.....	19

3. Kesatuan Bangsa dan Politik	22
4. Profil Bidang Ketahanan Bangsa	28
B. Kerangka Berfikir	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Dokumentasi.....	37
G. Uji Validitas Data	38
H. Metode Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum.....	42
2. Profil Kesbangpol Kota Semarang.....	42
3. Dasar Terbentuknya Kesbangpol.....	44
5. Kedudukan.....	45
6. Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
7. Profil Bidang Ketahanan Bangsa	49
8. Upaya Kesbangpol Kota Semarang Dalam Memberdayakan Ormas Islam Di Kota Semarang	51
9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Pemberdayaan Ormas Islam.....	68

B. Pembahasan..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir.....	31
3.1 Skema Analisis Data.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3: Daftar Ormas/LSM Kota Semarang

Lampiran 4: Instrumen Penelitian

Lampiran 5: Pedoman dan Hasil Wawancara

Lampiran 6: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan

Lampiran 7: Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1980-an, perkembangan Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya fenomena menguatnya religiusitas umat Islam. Fenomena yang sering ditengarai sebagai Kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) ini muncul dalam bentuk meningkatnya kegiatan peribadatan, menjamurnya pengajian, merebaknya busana yang Islami, serta munculnya partai-partai yang memakai platform Islam. Fenomena mutakhir yang mengisyaratkan menguatnya kecenderungan ini adalah tuntutan formalisasi Syariat Islam. Setelah Reformasi, kebangkitan Islam kini juga ditandai oleh munculnya aktor gerakan Islam baru. Aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam yang lama, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Gerakan mereka berada diluar kerangka mainstream proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya aktor baru ini sering disebut “Gerakan Islam Baru” (*New Islamic Movement*).

Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis,

konservatif, dan eksklusif. Berbagai ormas baru tersebut memang memiliki platform yang beragam, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan visi, yakni pembentukan “Negara Islam” (daulah islamiyah) dan mewujudkan penerapan syariat Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.

Gerakan Islamisasi versi mereka lebih bercorak konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang ada. Gerakan ini menghendaki adanya perubahan mendasar terhadap sistem yang ada saat ini (yang mereka sebut sistem sekuler atau “jahiliyah modern” dan kemudian berupaya menggantinya dengan sistem baru yang mereka anggap sebagai sistem Islam (nizam Islami). Agenda iqamah dawlah Islamiyah (mendirikan Negara Islam) dan formalisasi syariat Islam, merupakan muara dari semua aktivitas yang mereka lakukan (M. Imdadun Rahmat, 2005)

Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah, reformasi, demokrasi, dan desentralisasi. Masing-masing ormas di daerah memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik ormas dapat dilihat, antara lain, dari sifat, hubungan keagamaan, etnisitas hingga hubungan dengan pemerintah daerah.

Terkait dengan desentralisasi, posisi ormas-ormas tersebut di berbagai daerah relatif kuat seperti yang berada di pusat. Tingkat kepercayaan masyarakat pun masih tinggi kepada mereka daripada

kepada institusi negara. Ini sangat mungkin terjadi karena perhatian ormas kepada realita yang dihadapi masyarakat seringkali lebih bagus dibandingkan dengan perhatian dari negara. Di kalangan masyarakat bawah, soal perkawinan hingga kematian, ormas justru sering membantu secara riil sehingga hal itulah yang menjadikan kepercayaan masyarakat kepada ormas masih tinggi.

Terdapat beberapa pendapat tentang keberadaan Ormas saat ini di tengah-tengah masyarakat, misalnya anggapan miring bahwa ormas hanya merupakan biang keladi atau pangkal dari berbagai keributan, ketidaktenteraman, dan bentrokan yang ujung-ujungnya banyak merugikan masyarakat. Anggapan itu, tidak dapat dipisahkan sepenuhnya apabila kita melihat kenyataan bahwa banyak kegiatan yang berbalut dan berbaju ormas tetapi dalam praktiknya bukan memberikan kontribusi pemberdayaan terhadap masyarakat, tetapi justru menjadi beban masyarakat. Padahal, apabila kita melihat sejarah secara proporsional, maka kita akan menemukan kiprah ormas yang secara objektif bukan hanya berperan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih dari itu, ormas-ormas telah berjasa mendorong sikap dan sifat patriotisme pengorbanan pada masa perjuangan kemerdekaan. Contoh konkret peranan ormas secara umum yang telah berjasa dalam proses kemerdekaan negara kita adalah Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi

Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), dan lain-lain.

Keberadaan ormas-ormas besar keagamaan dicirikan oleh landasan ruh pendirian organisasi itu, yang tidak lain berlandaskan pada kesadaran ideologi untuk membangun jati diri dan kepribadian masyarakat secara baik yang berdasarkan pada “ahlaqul karimah”, sehingga dalam tataran kegiatannya telah mampu menggerakkan swadaya masyarakat secara efisien serta berorientasi pada kaum lemah, yang juga menghadirkan konsep-konsep alternatif yang terkadang tidak terjangkau oleh pemerintah secara kelembagaan, sehingga lebih bersifat inovatif. Melihat kiprahnya yang begitu besar hampir pada setiap bidang kehidupan, maka keberadaan ormas-ormas tersebut dianggap telah mampu melakukan transformasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Mencermati kiprah ormas-ormas besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, rasanya kurang bijak kalau kemudian melakukan generalisasi bahwa ormas hanya bisa melakukan keributan dan kericuhan saja, karena jauh dari sebelum kemerdekaan dicapai, telah ada ormas-ormas yang secara real melakukan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat, sehingga secara nyata ormas-ormas itu juga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, bukan hanya untuk tataran intern organisasinya, tetapi secara nyata tokoh ormas-ormas tersebut juga banyak berkiprah

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran resmi di dalam struktur pemerintahan maupun dalam konteks kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik nasional. Dengan demikian dalam abad modern yang ditandai oleh infrastruktur dan teknologi yang berkembang pesat, agar ormas tetap dapat berperan dan eksis di tengah-tengah masyarakat maka harus melakukan fungsinya sesuai dengan landasan organisasinya masing-masing.

Wujud dari peran serta tersebut, secara konkret harus dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam program-program kerja secara teknis sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman pada saat ini. Kecermatan perumusan program kerja merupakan salah satu langkah awal pengakuan akan eksistensi ormas tersebut. Ini artinya, akan terjadi seleksi secara ilmiah, dimana ormas yang benar-benar melakukan kiprah demi pemberdayaan masyarakat yang akan terus memperoleh tempat dan dukungan dari masyarakat, sementara ormas yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya secara sempit akan dengan sendirinya tersingkir dari kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah melalui Kesbangpol, antara lain mengeluarkan kebijakan fasilitasi pendanaan kegiatan ormas dalam bentuk pelatihan, seminar workshop dan sejenisnya, juga berupa bantuan keuangan dari SKPD terkait. Dengan demikian dari pengertian ormas di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “pemberdayaan organisasi masyarakat islam” adalah tujuan

yang di maksudkan dalam pemberdayaan organisasi masyarakat yang bertujuan membela kepentingan masyarakat, dengan pola keanggotaan yang luas dan berbasis masyarakat.

Jumlah ormas di Kota Semarang saat ini di perkirakan berjumlah 152 ormas. Ormas agama islam sendiri ada 19 ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol. Aktifitas ormas di Kota Semarang tidak begitu menonjol tetapi pergerakan mereka juga mengawasi setiap kebijakan pemerintah Kota Semarang. Apabila ada kebijakan yang melenceng maka mereka membenarkan dengan cara berdemo sesuai konstitusi.

Sebagaimana ormas KAMMI yang beberapa waktu lalu melakukan aksi demo di depan kantor Polda Kota Semarang guna menyuarakan aspirasi mereka atas kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau kerap di panggil Ahok. Ormas KAMMI bukanlah satu-satunya ormas islam yang mengikuti aksi demo tersebut. Ada beberapa ormas lainnya yang tentunya berbasis agama islam. Setiap ormas islam di Kota Semarang tidaklah terlalu signifikan dalam pergerakannya. Mereka hanya fokus pada setiap tindak-tanduk kebijakan pemerintah Kota Semarang yang sedang berjalan maupun belum berjalan. Mereka akan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah apabila ada yang tidak sesuai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai “Pemberdayaan Organisasi Masyarakat

Islam Oleh Kesbangpol Di Kota Semarang Tahun 2015-2016". Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Edi Suharto, 2005. hal 59)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kesbangpol Kota Semarang dalam memberdayakan ormas islam di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses pemberdayaan ormas islam di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kesbangpol Kota Semarang dalam proses memberdayakan ormas islam.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses pemberdayaan organisasi masyarakat islam tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemberdayaan yang di lakukan oleh Kesbangpol pada suatu organisasi masyarakat islam yang acap kali di cap sebagai organisasi yang anarkis.
2. Dari segi praktis,
 - a. Bagi Kesbangpol

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berkaitan dengan disiplin ilmu studi kelembagaan yang dapat bermanfaat untuk menjadi seorang kosultan politik.

- b. Bagi Organisasi Masyarakat Islam

Bagi organisasi masyarakat islam sebagai masukan bagi masyarakat dalam menggambarkan organisasi masyarakat islam yang sebenarnya.

E. Batasan Istilah

Penelitian yang sudah dilakukan memerlukan penegasan istilah yang berfungsi memberi batasan istilah mengenai hal-hal yang diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah, penegasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan

Samuel Paul mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah upaya pemanusiaan. (Siti Kurnia Widiastuti, 2015. Hal: 12)

Konsep pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. (Siti Kurnia Widiastuti, 2015. Hal: 12-13)

Dari teori diatas dapat saya simpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelolah semua potensi yang ada secara inovatif.

2. Organisasi Masyarakat Islam

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi yang mengedepankan mengakomodasi atau memperjuangkan kepentingan massa, baik organisasi massa kelas buruh, kaum tani, perempuan serta pemuda dan mahasiswa, yaitu kepentingan dan tujuan kesejahteraan sosial atau ekonomi. Atau Organisasi Masyarakat dapat pula diartikan sebagai perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan amat luas cakupannya. (Harno Malik, 2013)

Sedangkan Ormas Islam sendiri pengertiannya ialah Organisasi Masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa (masyarakat) yang tidak bertujuan politis. Bentuk

organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa/masyarakat yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-qur'an dan as-sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. (Sumber: www.blog.umy.ac.id)

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Salah satu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, khususnya di bidang Ketahanan Bangsa adalah menciptakan situasi kondusif antar sesama Ormas maupun LSM yang berada di naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dalam hal ini Kesbangpol adalah sumber utama peneliti dalam mencari data untuk melengkapi skripsi ini. Kesbangpol merupakan tangan panjang dari pemerintah kota Semarang yang bertugas langsung dalam menangani dan mengawasi ormas-ormas yang ada di kota Semarang. Kesbangpol melalui salah satu bidang yang juga menangani ormas yakni bidang Ketahanan Bangsa yang mempunyai tupoksi dalam pemberdayaan organisasi masyarakat. Sehingga peneliti mencari sumber data melalui bidang Ketahanan Bangsa.

4. Sub. Bidang Ketahanan Bangsa

Ketahanan Bangsa merupakan bagian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertugas menangani dan mendata seluruh Organisasi Masyarakat (ORMAS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketahanan Bangsa juga bertugas menciptakan situasi kondusif antar organisasi atau lembaga yang ada Kota Semarang agar tidak terjadi kesenjangan antar Ormas maupun LSM. Mereka juga harus mendata setiap Ormas dan LSM yang ada di Kota Semarang agar tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar).

Dalam Bidang Ketahanan Bangsa kinerja seluruh pegawai meliputi perencanaan, pengkoordinasian, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Ketahanan

Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama, serta Bidang Ketahanan Masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Organisasi Masyarakat Islam

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Eksistensinya seiring dengan keterbukaan sebagai bagian dari upaya menerapkan *good corporate social and community* oleh pelaku ormas, pada saat yang sama, ada keinginan untuk mengimplementasikan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan.

Ormas Islam sendiri pengertiannya ialah Organisasi Masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa

(masyarakat) yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa/masyarakat yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-qur'an dan as-sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

(Sumber: www.blog.umy.ac.id)

Keterkaitan antara pemerintah selaku regulator yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam kapasitasnya memberikan pemberdayaan, maka undang-undang keormasan itu masih cukup relevan untuk menjadi acuan. Paling tidak, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan stressing atau sebagai *entry point* bagi kelangsungan pembinaan organisasi masyarakat.

Dalam UU Nomor 17 tahun 2013 ditegaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Pasal 5

- a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h) Mewujudkan tujuan negara.

Sedangkan pada tataran fungsi dalam UU tentang Keormasan Nomor 17 tahun 2013 yang berfungsi sebagai;

Pasal 6

- 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- 3) Penyalur aspirasi masyarakat;
- 4) Pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pemenuhan pelayanan sosial;
- 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- 7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari catatan yang dikemukakan di atas, pemerintah daerah, sejalan dengan penerapan otonomi daerah yang diasumsikan sebagai pemberian kewenangan yang luas dan bertanggung jawab untuk membangun daerahnya serta pemberdayaan masyarakat daerah, merupakan konsekuensi dari desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah untuk mendorong terbangunnya organisasi massa yang lebih berdaya akan lebih mudah. Tidak lagi harus dibawah bayang bayang instruksi

pemerintah pusat. Proses dan dinamika pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) akan lebih leluasa untuk mengelola, menata dan mengatur sendiri masyarakat sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut:

- a. Organisasi sebagai wadah keuntungan bersama. Keuntungan bersama ini sering dinyatakan dengan organisasi membutuhkan orang dan orang juga membutuhkan organisasi atau perusahaan membutuhkan karyawan dan karyawan membutuhkan perusahaan. Organisasi ini dibentuk dan dipertahankan dalam prinsip demi keuntungan bersama di antara para pelakunya. Manusia memandang organisasi sebagai alat atau cara untuk membantu mencapai tujuan mereka, sedangkan organisasi membutuhkan manusia untuk membantu mencapai sasaran atau target organisasi. (Makmuri Muchlas, 2012. Hal:18)

- b. Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. (Malayu Hasibuan, 2013)
- c. Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui. (John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood).

Organisasi bisa juga disebut sekumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan. Kesamaannya itulah yang menyebabkan masing-masing individu, yang pastinya berbeda, mau bergabung dan menjadi anggotanya. Kesamaan bisa disebabkan kepentingan yang sama, cita-cita, harapan dan satu tujuan. Ada beberapa hal yang harus kita sadari dalam berorganisasi. Bahwa organisasi ini milik banyak orang, semua anggota, bukan milik pengurus atau ketua. Sedemikian banyak orang yang memiliki karakter, sifat, bahasa, kebiasaan yang berbeda memberi kita kesempatan belajar jenis-jenis manusia.

Berdasarkan defenisi diatas maka Ormas dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Ormas merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini

ialah, organisasi dakwah, yang menciptakan masyarakat bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama. Kedua, Ormas juga merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini publik yang dibelanya. Ketiga, Ormas adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab. Keempat, Ormas adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu, semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya. Kelima, Ormas juga berfungsi sebagai wahana kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin formal ataupun pemimpin non formal. Hal ini disebabkan karena mereka yang tergabung dalam lembaga ini telah terbiasa menyusun program untuk kepentingan anggota ormas. Karenanya itu, tidak heran ketika rata-rata parpol juga merekrut alumni Ormas ini sebagai kader mereka. Mereka di incar karena pada umumnya mereka telah cukup matang dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, organisasi juga berarti menawarkan karir karena pengetahuan dan keterampilan bisa didapatkan dalam organisasi masyarakat tersebut.

Secara umum, misi setiap Ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, adalah menyediakan pilihan-pilihan yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan. Kedua, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan

masarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Menurut Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri, Ormas di Indonesia terdiri atas tiga tipe yakni ormas berstruktur yang memiliki basis massa dan pengurus cabang hingga ke tingkat kabupaten/kota, seperti NU, Muhammadiyah, GP Ansor dan sebagainya. Lalu ada ormas yang tidak berstruktur dan tidak berbasis anggota, namun memiliki kepengurusan yang berkedudukan di pusat pelayanan administrasi, yakni LSM, dan terakhir ormas yang berbasis institusi seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan sebagainya. (Media Indonesia, 2013)

2. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya (kekuatan). Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bias hidup mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat. Makna pemberdayaan menurut LSM adalah

usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan riilnya, dengan usaha dan kemampuan masyarakat sendiri, melalui indikator ekonomi, sosial dan budaya (Yunani dalam Sa'adah, 2014).

Sedangkan menurut Kepala Kesbangpol pemberdayaan adalah suatu proses dimana orang-orang (pengurus ormas) dalam mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini berkaitan dengan tujuan berbagai organisasi. (Kesbangpol, 2016)

Samuel Paul mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Pemberdayaan pada intinya adalah upaya pemanusiaan. (Siti Kurnia Widiastuti, 2015. Hal: 12)

Konsep pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan

dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. (Siti Kurnia Widiastuti, 2015. Hal: 12-13)

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan diri dari dalam terhadap segala bentuk penindasan. Menurut Priyono dan Pranaka, pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni:

- 1) Mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sector kehidupan.
- 2) Melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang di berdayakan untuk meraih keberdayaannya. Sehingga pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Hal itu di perkuat dengan pendapat Moh Ali Azis yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui dalam melaukan pemberdayaan. Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipasif). Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk di selesaikan. Keempat, mencari cara penyelesaian masalah yang sedang di hadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural

yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk di nilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. (Siti Kurnia Widiastuti, 2015. Hal: 13)

Pemberdayaan adalah pilihan, kebebasan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, martabat, penghargaan, kerjasama, dan rasa saling memiliki pada komunitas. Jo Rowl dan menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana individu, organisasi atau kelompok yang dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi sadar dan tahu (*having knowledge*) akan dinamika kekuasaan yang bekerja dalam konteks kehidupan mereka, membangun keterampilan dan kapasitas untuk memperoleh control pada kehidupan mereka, menjalankan (*exercise*) control tanpa mengganggu hak-hak orang lain, dan mendukung upaya pemberdayaan (individu atau kelompok) lain dalam masyarakat. (Siti Kurnia Widiastuti, 2015. Hal: 14)

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi

komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997).

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain)

- b) Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.

c) Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

3. Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan tangan panjang dari pemerintah dalam menangani urusan-urusan yang ada di Kota agar menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di dalam Kota Semarang. Unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, khususnya di bidang Ketahanan Bangsa adalah menciptakan situasi kondusif antar sesama Ormas/LSM yang berada di naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Bahwa untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan serta menciptakan Kesejahteraan secara demokratis, dan dikarenakan wilayah negara yang terlalu luas, maka perlu adanya Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang, maka salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Semarang adalah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Peran dan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang karena disamping menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, juga mempunyai fungsi ketertiban dan keamanan daerah serta deteksi dini potensi konflik yang ada di wilayah Kota Semarang baik konflik sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), Sengketa kewenangan, sengketa lahan, konflik SARA, konflik ormas, konflik pada institusi pendidikan, maupun konflik kesenjangan sosial.

1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran/ menyajikan data tentang keberadaan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi tugas pokok dan fungsinya serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung program pemerintahan daerah selama tahun 2013.

2. Adapun tujuan dari pembuatan buku profil ini adalah :

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat dan para stake holder akan informasi tentang Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik dalam mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Semarang.

- b) Menyajikan sejumlah data-data dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasinya maupun permasalahan dan kendala yang dihadapi.

3. Landasan Hukum

Dasar terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah :

- a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
- b) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 23).
- c) Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang;

- d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah merencanakan, membina, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang ketahanan bangsa dan pendidikan politik.

4. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Ketahanan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- e) Pelaksanaan kesekretariatan badan

- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

5. Visi dan Misi

Dari Kesbangpol Kota Semarang memiliki visi yang menjadi acuan untuk kinerja para pegawainya yaitu “Menjadi Penggerak Menuju Dinamika Masyarakat Jawa Tengah yang Demokratis”

- a) Memfasilitasi terwujudnya dinamika kehidupan bermasyarakat yang toleran, demokratis, terbuka, dan dewasa, melalui partisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Menumbuhkembangkan kemandirian dan dinamika partai politik, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, dan lembaga pemerintah.
- c) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semangat persatuan dan kesatuan bangsa, cinta tanah air, serta mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, menjadi identitas watak dan alat pemersatu bangsa.

- d) Mendorong dan menumbuhkembangkan terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta terlindunginya dari ancaman konflik.

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa dan bidang Politik Dalam Negeri.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam pelaksanaan kebijakan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah menetapkan rencana-rencana program dan rencana kegiatan yang hendak dicapai selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik Aparatur (sumber daya manusia) maupun Teknologi (mesin & peralatan lainnya).

Visi misi, tujuan, sasaran yang hendak dicapai dan penentuan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat di Kota Semarang telah diupayakan seoptimal mungkin oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam Tahun 2013.

6. Profil Bidang Ketahanan Bangsa

Ketahanan Bangsa merupakan bagian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertugas menangani dan mendata seluruh Organisasi Masyarakat (ORMAS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketahanan Bangsa juga bertugas menciptakan situasi kondusif antar organisasi atau lembaga yang ada Kota Semarang agar tidak terjadi kesenjangan antar Ormas maupun LSM. Mereka juga harus mendata setiap Ormas dan LSM yang ada di Kota Semarang agar tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar).

Dalam Bidang Ketahanan Bangsa kinerja seluruh pegawai meliputi perencanaan, pengkoordinasian, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama, serta Bidang Ketahanan Masyarakat.

Bidang Ketahanan Bangsa terdiri dari:

a. Sub bidang ketahanan nasional, ekonomi, budaya dan agama, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dan agama.
- 2) Menyiapkan bahan peningkatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan.
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama.

- b. Sub bidang ketahanan masyarakat mempunyai tugas:
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan masyarakat.
 - 2) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan masyarakat

B. Kerangka Berfikir

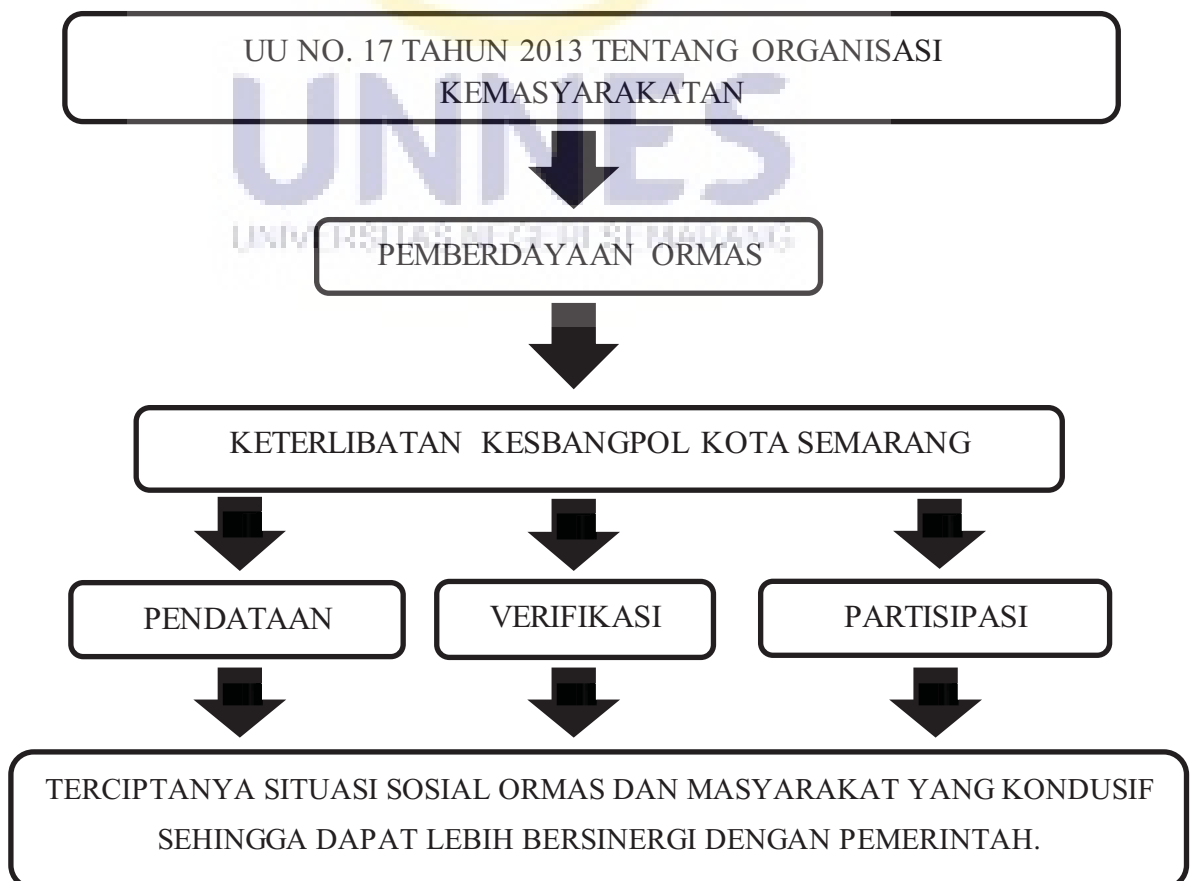
Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Secara garis besar, yang dimaksud ormas adalah sekumpulan orang yang bersepakat menyatukan diri untuk membentuk organisasi, yang terdiri atas adanya AD/ART, memiliki sekretariat berkedudukan di suatu daerah dan akan membentuk perwakilan/cabang di daerah lain, yang terdaftar serta berbadan hukum yang berkekuatan tetap.

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga negara, merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat, merupakan suatu yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ormas dengan segala bentuknya telah hadir, tumbuh dan berkembang, sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian diatas mengenai kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Setiap upaya dalam pemberdayaan haruslah memiliki sistematis yang jelas untuk menjadi panduan dalam memberikan pemberdayaan yang benar agar ormas islam di kota Semarang dapat terjamin keberlangsungan hidupnya. Dalam hal ini Kesbangpol Kota Semarang menggunakan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Upaya tersebut adalah: (1) Fasilitasi Kebijakan yang berupa mengimplementasikan undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan ormas, (2) Penguatan Kapasitas Kelembagaan. (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lalu sosialisasi tentang program pemberdayaan yang harus di tekankan oleh Kesbangpol supaya terciptanya situasi kondusif antara pemerintah daerah dengan ormas-ormas islam yang ada di kota Semarang.
- 2) Faktor pendukung: Subsidi materil maupun fasilitas dari pemerintah tentulah harus mendukung juga supaya Kesbangpol

dapat memberikan pemberdayaan dengan maksimal tanpa ada hambatan-hambatannya. Dalam hal ini Kesbangpol harus bisa memaksimalkan perannya sebagai tangan kanan pemerintah Kota Semarang sehingga tidak ada kesenjangan antara pemerintah dengan ormas islam yang menginginkan adanya pemerdayaan guna meningkatkan mutu kualitas ormas islam di kota Semarang. Faktor penghambat: Permasalahan yang dapat menghambat proses pemberdayaan ada dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di Kesbangpol, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya. Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain, yaitu: Memberikan pelatihan-pelatihan seperti *Capacity Building* dan *Training Of Trainer*, Menyiapkan sarana pelatihan, Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, Mempermudah ijin-ijin ormas, Pemberian dana pemberdayaan dan fasilitasi kapasitas pengurus ormas, Arahan pembinaan manajemen organisasi, Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggungjawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya. Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Kesbangpol.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas tersebut peneliti menyarankan sebagai berikut:

- 1) Kesbangpol sebagai tangan panjang dari pemerintah daerah harus bisa memberikan pemberdayaan yang sesuai dengan pasal 40 UU No. 17 tahun 2013 secara maksimal. Kesbangpol harus bisa menjadi seperti bapak atau pemimpin yang mengayomi keluarganya, dalam hal ini ormas di kota Semarang.
- 2) Ormas diharapkan dapat terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan. Ormas diharapkan turut terlibat sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ormas harus bisa lebih bersinergi dengan pemerintah melalui komunikasi-komunikasi antar kedua belah pihak supaya tidak ada kesenjangan sosial antar pemerintah dengan ormas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian, 2013. HMI 1963-1966 Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Anwas, Oos M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung, Alfabeta.
- Gitosudarmo, Indriyo dan I Nyoman Sudita, 1997. Perilaku Keorganisasian, Yogyakarta. BPFE.
- Herminingsih, 2014. Budaya Organisasi. CV. :ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Lambolo, Muhamdam. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada..
- Miftah Thoha, 2005. Dimensi-Dimensi Prima ILMU ADMINISTRASI NEGARA. Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moelong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchlas, Makmuri. 2012. Perilaku Organisasi. Gadjahmada Universty Press, Yogyakarta.
- Prof. Dr. Rahardjo, M. Dawam, Cetakan Kedua 2002. Mewujudkan Satu Ummat. Jakarta. PT. Pustaka Zaman
- Rochmulyati Hamzah., 2004. Pengembangan Organisasi Jakarta : Pustaka Binaman Pressido.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Veithzal Rivai, 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widiastuti, Siti Kurnia.2015. Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

INTERNET

- Masyarakat, Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>
- Organisasi, Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>

Sumber :<http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/tujuan-organisasi-kemasyarakatan-ormas.html>

Sumber :<http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-organisasi-kemasyarakatan-ormas.html>

<http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/fungsi-organisasi-kemasyarakatan-ormas.html><http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/hak-dan-kewajiban-organisasi.html>

Sumber :<http://simplenews05.blogspot.co.id/2013/08/hak-dan-kewajiban-organisasi.html>

<http://po-box2000.blogspot.com/2010/11/lembaga-lembaga-negara-di-indonesia.html>

<http://winkoes.blogspot.com/2013/08/lembaga-negara-fungsi-dan-tugasnya.html>

UNDANG-UNDANG

UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN KEORMASAN



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG